

organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kampanye. Tinjauan ini penting terutama setelah diberlakukannya UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta UU No. 8 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah dilakukan penataan hubungan antara organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan secara lebih fungsional.

Meskipun demikian, dalam praktek kehidupan di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, antara organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dapat terjadi hubungan timbal-balik yang dapat saling menguntungkan. Bagaimanakah gambaran hubungan organisasi-organisasi politik dengan organisasi kemasyarakatan di masa mendatang diulas oleh M. DJADIJONO dalam tulisannya tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN KAMPANYE PEMILU.

Dari pengamatan atas pelaksanaan kampanye, orang dapat menduga bahwa apabila kampanye Pemilu diikuti oleh sedemikian besar peserta, maka hasil suara/kursi yang didapat oleh OPP yang bersangkutan akan cukup besar pula. Atau dengan kata lain besar dan meriahnya kampanye sesuatu kekuatan sosial-politik peserta Pemilu dijadikan tolok-ukur bagi perolehan suara atau kursi. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa besar dan meriahnya pelaksanaan kampanye oleh organisasi-organisasi politik peserta Pemilu tidak selalu mencerminkan besarnya prestasi mereka di dalam pengumpulan suara atau kursi di lembaga-lembaga perwakilan. Bagaimana gambaran peta kekuatan sosial-politik hasil Pemilu 1987 yang baru lalu itu ditelaah oleh SUDIBJO dalam PEMILU 1987.

Dalam pada itu, oleh karena daerah pemilihan DKI Jakarta ini merupakan ajang perebutan gengsi dari ketiga partai politik, terutama karena kehidupan politik DKI Jakarta dijadikan barometer kehidupan politik nasional, maka gambaran peta kekuatan politik di DKI Jakarta diuraikan oleh Subagyo PARTODIHARDJO dalam tulisannya, PERUBAHAN PETA POLITIK DI DKI JAKARTA SETELAH PEMILU 1987. Daerah pemilihan lain, yaitu Jawa Timur merupakan basis kekuatan NU, yang untuk Pemilu kali ini menyatakan keluar dari PPP, bahkan akan "menggemboskan" kampanye PPP. Bagaimana hasil/peta kekuatan politik di daerah pemilihan Jawa Timur itu dikaji oleh Wiratmo PRAWIROYUDHO dalam tulisannya, EVALUASI PEMILU 1987 DAERAH JAWA TIMUR.

Tema-tema itu menjadi pusat perhatian ANALISA nomor ini. Tulisan-tulisan itu mungkin dapat memberi gambaran tentang perspektif kehidupan kekuatan-kekuatan sosial-politik maupun organisasi kemasyarakatan di masa mendatang yang diharapkan mengarah kepada makin mantapnya pembangunan politik nasional yang sehat.

Evaluasi Kampanye Pemilu 1987

Tommi LEGOWO*

Pemilihan Umum 1987 telah usai dan hasil-hasilnya pun sudah diketahui masyarakat luas. Sebagai bagian dari proses Pemilu yang penting adalah kampanye pemilihan umum. Kampanye Pemilu sendiri mungkin tidak berpengaruh atas kemenangan atau kekalahan masing-masing kontestan Pemilu. Pada dasarnya dapat diduga bahwa sikap pemilih telah ditentukan jauh sebelumnya. Memang pada situasi dan kondisi tertentu bisa saja terjadi perubahan sikap pemilih sebagai akibat positif atau negatif dari kampanye Pemilu yang dilakukan oleh masing-masing kontestan.

Kampanye merupakan kesempatan bagi para kontestan untuk mengadakan komunikasi langsung dan terbuka dengan para pendukung dan simpatikannya sedemikian rupa sehingga rakyat luas dapat tertarik untuk ikut mendukung mereka. Masyarakat luas di luar pendukung dan simpatisan biasanya enggan turut serta berkampanye untuk salah satu kontestan tertentu. Kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu, rakyat luas dapat secara spontan maupun dimobilisasi untuk turut secara langsung berkampanye bagi salah satu kontestan. Namun terlepas dari persoalan tersebut, kampanye Pemilu sebagai salah satu bentuk partisipasi politik¹ seringkali membawa pesan-pesan tertentu yang sangat bermanfaat bagi usaha-usaha pemenuhan kepentingan bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Dalam kaitan inilah kampanye Pemilu 1987 yang baru lalu perlu mendapat perhatian secara saksama.

Kampanye Pemilu 1987 telah berlangsung dengan lancar, aman dan tertib. Dalam empat kali Pemilu selama masa Orde Baru, mungkin baru kali inilah

*Staf CSIS.

¹Partisipasi politik secara sederhana diartikan sebagai kegiatan warga negara biasa yang sengaja maupun tidak sengaja berkaitan, dan karena itu mempengaruhi, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan. Partisipasi politik ini dapat dilakukan secara pribadi maupun kelompok, spontan maupun dimobilisasi, legal maupun ilegal.

rakyat Indonesia menjalani masa-masa kampanye secara relatif tenang dan tenteram. Ini tidak berarti bahwa rakyat pasif atau acuh tak acuh terhadap politik, melainkan mereka telah menanggapi kampanye secara lebih dewasa, baik dalam sikap, wawasan maupun perilakunya. Meski baru kelihatan pada putaran terakhir masa kampanye, antusiasme rakyat tetap tersentuh sehingga tampak pula bahwa mereka tetap tidak ingin kehilangan "kedaulatan politiknya" dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Di beberapa daerah pemilihan tertentu dan dalam beberapa kesempatan kampanye memang telah terjadi beberapa "gesekan" fisik antar-massa yang sedang berkampanye, namun suasana aman, tenteram dan gembira tetap dapat dipelihara di kalangan masyarakat luas. Kampanye Pemilu kali ini memang terasa benar-benar bagaikan "pesta demokrasi"nya seluruh rakyat Indonesia, dan telah memberikan nuansa dan perspektif baru serta maju bagi kehidupan politik bangsa Indonesia pada umumnya.

KAMPANYE UNTUK PENDIDIKAN POLITIK

Beberapa perubahan mendasar, baik dalam konsep, pola maupun pelaksanaan kampanye, telah menjadi modal utama bagi terselenggaranya kampanye Pemilu secara lancar, aman, dan tertib. Perubahan ini selain didasari oleh kehendak bersama untuk tidak mengulangi pengalaman yang merugikan dari kampanye Pemilu seperti pada masa-masa yang lalu,² juga merupakan konsekuensi logis dari diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas semua partai politik dan Golongan Karya dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan berlandaskan pada UU Pemilu 1985 dan UU Parpol dan Golkar 1985, Pemilu dan kampanye Pemilu 1987 diselenggarakan.

Salah satu perubahan dasar itu menyangkut soal tema kampanye Pemilu. Bila dalam kampanye-kampanye Pemilu sebelumnya, Partai Politik dan Golongan Karya sebagai organisasi peserta pemilihan umum (OPP) boleh mengemukakan tema-tema kampanye yang mencerminkan asas ciri mereka, di samping juga harus mengemukakan program-programnya, maka dalam kampanye kali ini, OPP harus memanfaatkan masa kampanye untuk hanya menampilkan tema-tema kampanye yang mencerminkan program-program pembangunannya sebagai pengamalan Pancasila.³ Dengan Pancasila sebagai

²Himbauan Presiden Soeharto agar diadakan penelitian mengenai cara pelaksanaan kampanye Pemilu yang dapat berlangsung secara lebih baik. Lihat *Kompas*, 14 Mei 1982.

³Lihat *Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum*, khususnya Pasal 6; bandingkan dengan *Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum* dan *Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum*. Terlihat bahwa di dalam keputusan terdahulu itu tidak terdapat batasan yang

satu-satunya asas OPP, tema-tema kampanye memang tidak bisa lain kecuali merupakan jabaran dan rincian dari asas Pancasila itu sendiri. Dengan ketentuan dasar ini, sebenarnya kampanye Pemilu 1987 telah terhindar dari kemungkinan munculnya pertentangan dan konflik ideologis karena penonjolan-penonjolan asas-asas ciri oleh masing-masing OPP. Secara demikian, kampanye Pemilu yang kelima bagi bangsa Indonesia dapat menjadi ajang dan arena bagi OPP untuk semata-mata menawarkan program-program pembangunannya kepada rakyat banyak. Karena itu, tekanan utama kampanye Pemilu 1987 tertuju pada aspek-aspek kualitatif, baik menyangkut program maupun personalia masing-masing OPP.

Secara formal, kampanye Pemilu diartikan sebagai kegiatan organisasi peserta Pemilu untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu anggota DPR, DPRD I dan DPRD II. Namun berbeda dari ketentuan peraturan kampanye Pemilu terdahulu,⁴ ketentuan kampanye Pemilu 1987 menyebutkan bahwa kampanye Pemilu harus disampaikan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggairahkan pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Secara tersirat, ketentuan ini menekankan arti penting dari aspek kualitatif kampanye Pemilu bagi pendidikan politik rakyat. Secara demikian, tidak bisa dihindari untuk mengartikan kampanye Pemilu 1987 yang baru lalu itu sebagai proses komunikasi politik antara OPP sebagai pemberi informasi di satu pihak dan rakyat sebagai penerima informasi di lain pihak secara timbal-balik sehingga terbangun konsensus-konsensus dan komitmen-komitmen baru tentang usaha-usaha mencapai cita-cita bersama bangsa dan Negara Indonesia.

Dalam kerangka pemikiran itu, kampanye harus memberikan suasana "kebebasan" agar OPP dapat menawarkan program-programnya secara terbuka dan jelas kepada rakyat; sementara rakyat juga bebas, tanpa paksaan dan semacamnya, menilai program-program yang ditawarkan tersebut dan kemudian boleh menolak dan/atau menyetujui program-program itu. Suasana kebebasan yang tumbuh dalam kampanye ini pada dasarnya dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan OPP menjabarkan dan mengkomunikasikan program sehingga menarik untuk didengar dan dipertimbangkan oleh rakyat pada umumnya. Demikian pula, karena kampanye 1987 itu bercirikan "program oriented" yang mestinya bersangkutan-paut dengan gagasan-gagasan, maka rakyat pun sebenarnya juga dituntut untuk menggunakan sarana berpikirnya agar dapat memberikan penilaian yang sewajarnya atas gagasan pro-

pasti tentang tema dan materi kampanye Pemilu bagi masing-masing OPP, sehingga masing-masing OPP bebas mengemukakan gagasan-gagasannya dan cara-cara melaksanakan gagasan-gagasan tersebut untuk pembangunan bangsa Indonesia.

⁴Ketentuan kampanye Pemilu 1977 dan 1982 menyebutkan bahwa kampanye Pemilu dilaksanakan dengan saksama, tertib, kesatria, jujur dan bertanggungjawab. Lihat *Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1976* dan *Keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 1982*.

gram yang ditawarkan tersebut. Secara demikian, kampanye Pemilu ini dapat dilihat pula sebagai mekanisme untuk pendidikan politik dan untuk "job-training" bagi para pemimpin bangsa di masa depan (setidak-tidaknya untuk kurun waktu 5 tahun mendatang).

Meskipun UUD 1945 dan UU tentang Pemilu 1985 tidak secara tersurat menyatakan kampanye Pemilu sebagai suatu mekanisme untuk perekrutan dan latihan bagi para kader-kader calon pemimpin bangsa dan sebagai mekanisme pendidikan politik, jelas bahwa masa-masa kampanye Pemilu sangat mangkus dan sangkil untuk maksud-maksud tersebut. Pada masa kampanye Pemilu itu, masing-masing kontestan beserta calon-calon dan juru-juru kampanyenya (Jurkamnya) dipaksa untuk menunjukkan kemampuannya dalam merumuskan, melontarkan dan merasionalkan program-program organisasi mereka dalam bentuk isu-isu penting dan mendesak tentang usaha-usaha pembangunan bangsa. Tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap isu-isu tersebut merupakan cermin aspirasi masyarakat yang belum terumuskan secara baik. Tetapi mungkin pula tanggapan masyarakat itu merupakan reaksi terhadap kondisi-kondisi sosio-ekonomi yang berkembang pada saat itu. Dalam kaitan inilah, para kontestan beserta jajarannya, karena mereka adalah calon-calon wakil rakyat, wajib menangkap pesan dan merumuskan aspirasi yang berkembang di masyarakat itu secara jujur dan benar. Sekali lagi kepekaan menangkap aspirasi dan pesan masyarakat serta kemampuan mereka merumuskannya diuji kembali.

Pada sisi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, rakyat juga mengalami proses pendidikan politik. Materi dan janji program-program yang memenuhi hari-hari kampanye dapat mendekatkan masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya kepada nilai-nilai dan lembaga-lembaga politik kemasyarakatan yang berlaku, dan mengajarkan kepada mereka (para pemilih khususnya) tentang karakteristik sistem yang berlangsung dan masalah-masalah bangsa dan negara yang mereka hadapi. Rakyat diperkenalkan pada masalah-masalah ekonomi dan ekologi, pertanian dan pembiayaannya, hak-hak sipil dan tanggung jawab warga negara, dan tentang berbagai macam upaya yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Masa-masa kampanye ini menyediakan kesempatan kepada rakyat untuk mengerti dan memahami mengapa dan bagaimana kontroversi-kontroversi timbul dan kemudian diselesaikan; bagaimana lembaga-lembaga politik merumuskan permasalahan-permasalahan dan memprosesnya untuk dijadikan kebijakan-kebijakan umum; bagaimana janji-janji kampanye dipegang teguh dan dilaksanakan ataupun sebaliknya; bagaimana masa depan bangsa dirancang dan bagaimana masa lalunya diinterpretasikan.

Banyak manfaat yang bisa diungkap mengenai pentingnya kampanye Pemilu bagi proses pendidikan politik bangsa. Kampanye Pemilu, dengan

demikian, bukan sekedar arena dan masa untuk usaha mencari sebesar-besarnya dukungan rakyat atau untuk mencari kemenangan dalam Pemilu, tetapi juga merupakan masa dan arena untuk mencari dan menumbuhkan kesepakatan-kesepakatan baru yang diperlukan guna menyesuaikan dan mempercepat langkah-langkah memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa.

Konsekuensi potensial dari kampanye Pemilu semacam itu adalah pengaruhnya, baik dirancang maupun tidak disengaja, atas (pelaksanaan) berbagai kebijaksanaan pemerintah. Misalnya, tema-tema yang dikembangkan dalam kampanye yang sifatnya memang pragmatis sebenarnya merupakan tanggapan, entah mendukung, menolak ataupun memberikan pilihan, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Demikian pula, pawai-pawai kampanye sering membawa pesan-pesan atau simbol-simbol tertentu yang pada esensinya merupakan reaksi massa yang berkampanye itu terhadap situasi dan kondisi kemasyarakatan dan/atau pemerintahan yang berlangsung saat itu. Oleh karena itu, kampanye Pemilu yang berorientasi pada program sebenarnya bisa menjadi ajang "koreksi" masyarakat (sebagian, tentu saja) terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang langsung meng-kena-i keberlangsungan hidup mereka sehari-hari. Secara demikian, masa kampanye Pemilu ini merupakan kesempatan yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dan nyata dalam kehidupan politik. Pada akhirnya, kesempatan dan pengalaman berpartisipasi politik akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat itu sendiri.

Berawal dari dasar pemikiran itu dapat diamati dan dievaluasi penyelenggaraan dan pesan-pesan aspiratif kampanye Pemilu 1987 yang baru lalu itu. Peranan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Lembaga Pemilu sebagai pihak penyelenggara kampanye Pemilu, dan peranan dan sikap ABRI sebagai pihak pengaman penyelenggaraan Pemilu, telah memberikan dukungan dan sumbangan yang berarti bagi terciptanya suasana keterbukaan dan kebebasan dalam kampanye Pemilu itu. Demikian pula, persiapan dan kesiapan OPP dalam menjalani masa kampanye ini telah membuktikan seberapa jauh tingkat kemampuan politik mereka dalam menangkap dan menyalurkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang pada akhirnya juga telah menciptakan iklim keberhasilan kampanye Pemilu. Sementara itu, tanggapan masyarakat luas pada umumnya ternyata berbeda dari apa yang sering diperkirakan orang. Antusiasme masyarakat telah menyemarakkan berlangsungnya kampanye Pemilu 1987 secara lebih dinamis dan penuh dengan imajinasi. Meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan sebelumnya, kampanye Pemilu 1987 telah memberikan gambaran tentang kehidupan politik demokrasi Pancasila yang lebih maju dan lebih baik daripada kampanye-kampanye Pemilu pada masa-masa sebelumnya.

PENGORGANISASIAN DAN PENGAMANAN

Salah satu faktor penentu ketenangan pelaksanaan kampanye Pemilu 1987 adalah tata-laksana dan pengaturan kampanye, yang dalam hal ini dipertanggungjawabkan kepada Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. LPU menyediakan masa waktu untuk kampanye Pemilu 1987 selama 24 hari, terhitung mulai tanggal 24 Maret 1987 sampai dengan tanggal 17 April 1987. Dibandingkan dengan kampanye pada masa-masa sebelumnya, masa waktu kampanye kali ini memang terasa sangat singkat (Tabel 1).

Tabel 1

MASA KAMPANYE PEMILU DARI TAHUN KE TAHUN

Pemilu	Masa Kampanye	Minggu Tenang	Keterangan
1977	60 hari	7 hari	Sulit dicari keterangan yang pasti mengenai penentuan masa waktu ini, kecuali, dilakukan penyempitan-waktu untuk mengurangi kemungkinan kebringasan yang muncul dalam kampanye
1982	45 hari	5 hari	
1987	24 hari	5 hari	

- Sumber: 1. Keppres No. 44 tahun 1976 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye Pemilu.
 2. Keppres No. 3 tahun 1982 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye Pemilu.
 3. Keppres No. 27 tahun 1986 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye Pemilu.

Semakin sempitnya masa kampanye dari Pemilu ke Pemilu, selain disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yakni makin mengurangnya dana pemerintah, juga dan terutama didasari oleh pertimbangan untuk memperkecil muncul dan berkembangnya *kebringasan sosial* dalam masa kampanye itu, yang pada kampanye-kampanye terdahulu dinilai terlalu mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Memang terbukti kebringasan sosial tidak terjadi pada kampanye Pemilu 1987. Namun begitu perlu diteliti lebih jauh korelasi antara masa kampanye dan intensitas kebringasan sosial. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa dengan waktu yang relatif singkat itu kampanye Pemilu ini terasa telah memberi kesan yang lebih baik.

Kampanye Pemilu yang baru lalu itu juga diatur agar masa kampanye OPP yang satu tidak mungkin berbenturan waktu dan tempat dengan masa kampanye OPP yang lain sehingga tidak terjadi pertempuran fisik antar-massa yang berkampanye itu. Salah satu efek kampanye yang mengerahkan massa adalah kecenderungan massa untuk menjadi emosional. Kampanye demikian pada dasarnya bertujuan untuk mempertontonkan kepada simpatisan dan rakyat bahwa kekuatan politik itu benar-benar ada dan kuat (pamer kekuatan). Biasanya tekanan ditujukan pada usaha membakar se-

mangat massa dengan mengeksploitir dan memanipulir hal-hal tertentu yang menonjol. Dalam suasana demikian, emosi massa sangat mudah diarahkan pada hal-hal yang begitu "menguras" perasaan hingga bisa menumbuhkan rasa curiga dan bermusuhan yang mendalam. Akibatnya, sedikit "senggolan" saja bisa menghasilkan kebringasan sosial yang tidak terkendali dan berlarut-larut. Pemisahan waktu dan tempat kampanye telah memperkecil kemungkinan terjadinya bentrokan fisik semacam itu. Tabel 2 dan 2a menunjukkan bagaimana pengaturan waktu dan tempat kampanye di daerah pemilihan DKI Jakarta diselenggarakan.

Tabel 2

PENGATURAN WAKTU KAMPANYE DI DKI JAKARTA

Penyelenggaraan pada tingkat	Tanggal Kampanye			Keterangan
	PPP	Golkar	PDI	
Kecamatan	24-3-1987	25-3-1987	26-3-1987	Bentuk-bentuk kampanye adalah rapat umum dan pawai keliling
Kecamatan	27-3-1987	28-3-1987	29-3-1987	
Kecamatan	30-3-1987	1-4-1987	2-4-1987	
Kecamatan	3-4-1987	4-4-1987	5-4-1987	
Kecamatan	6-4-1987	7-4-1987	8-4-1987	
Kota	9-4-1987	10-4-1987	11-4-1987	
Kota	12-4-1987	13-4-1987	14-4-1987	
DKI	15-4-1987	16-4-1987	17-4-1987	

Tabel 2a

TEMPAT-TEMPAT PENYELENGGARAAN KAMPANYE DI DKI JAKARTA

Penyelenggaraan Tingkat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Utara	Jakarta Barat
Kecamatan	Lapangan Bola Cideng	Lapangan Bola Jl. Tebet Timur	Lapangan Bola Kramatjati	Stadion Mini	Lapangan Bola Meruya Udik
	Stadion Mini Rawasari	Lapangan Bola Karet Kuningan	Lapangan Bola Kelapa Dua Timur	Lapangan Bola Kompleks AL	Lapangan Orchid
	Lapangan Bola Borobudur	Lapangan Bola Pomad	Lapangan Parkir Pulo Mas	Stadion Mini Pluit	Lapangan Bola Petak Singkiang
	Lapangan Bola Pors	Lapangan Bola Trakindo	Lapangan Buaran Indah	Lapangan Bola Jl. Dobo	Lapangan Bola Pertamina
	Lapangan Bola Lancer	Lapangan Bola Tanah Kusir	Lapangan Bola Pertamina		
	Lapangan Merah	Lapangan Bola Blok S	Lapangan Bola Urip Sumoharjo		
		Lapangan Bola Lebak Bulus			
Kota	Parkir Timur Senayan	Stadion Mini Lebak Bulus	Lapangan Pulo Mas	Stadion Mini	Lapangan Orchid
DKI	Parkir Timur Senayan				

Dalam pengorganisasian ini, Jawa Tengah secara relatif telah tampil sebagai daerah pemilihan yang melaksanakan kampanye paling baik,⁵ sementara Jakarta, Sumatra Utara, Riau dan Yogyakarta mengalami eksekusi kampanye yang berupa bentrokan fisik antar-massa OPP yang sedang berkampanye. Bentrokan tersebut, yang segera dapat diatasi oleh pihak keamanan, mungkin saja diinginkan oleh pihak-pihak tertentu atau sekedar merupakan akibat dari emosi massa yang meluap-luap. Namun khusus di daerah Yogyakarta, bentrokan massa terjadi, di samping karena dua kemungkinan sebab di atas, juga karena pengaturan tatalaksana kampanye. Tempat kampanye antara satu OPP tertentu dan OPP yang lain terpisah cukup jauh, namun kampanye mereka itu diselenggarakan pada waktu yang bersamaan. Hal ini memang masih memberi kemungkinan yang lebih besar bagi terjadinya pertemuan fisik antara massa OPP satu dan yang lain tersebut. Pengalaman itu membuktikan perlunya pemisahan waktu kampanye antara satu OPP dan OPP yang lain.

Pengaturan waktu dan tempat kampanye seperti di atas telah membantu usaha-usaha pengamanan jalannya kampanye Pemilu. Di samping itu, aparat keamanan juga telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Setiap pelanggaran atas aturan-aturan umum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan kampanye yang ada yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak disengaja oleh OPP apa pun dikenai sanksi-sanksi hukum. Memang tetap dirasakan bahwa pada tingkat pedesaan masih terdapat sikap-sikap yang kurang "bijaksana" dari aparat keamanan, khususnya panwaslak, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dari dan antar-OPP. Namun secara keseluruhan, suasana yang berkembang dan ditumbuhkan oleh aparat keamanan telah mendukung terciptanya suasana kebebasan yang sangat penting bagi berlangsungnya proses demokratisasi yang bertanggungjawab. Dengan kata lain, rakyat telah setahap-demi-setahap disadarkan bahwa kampanye Pemilu dan Pemilu sebagai cara hidup bukanlah keadaan darurat yang dapat dijadikan alasan untuk melanggar ketertiban umum.

Dari sikap yang ditampilkan oleh aparat keamanan tersebut terlihat bahwa ABRI betul-betul ingin memainkan peran dinamisator dan stabilisator secara baik dan konsekuen dalam mengembangkan kehidupan politik nasional. Secara langsung ataupun tidak langsung, ABRI telah berkampanye untuk Pemilu, meskipun bukan untuk salah satu kontestan Pemilu tertentu. Dengan ungkapan lain, ABRI telah tampil dengan peran "demokratisator." Karena itu, kehadiran ABRI telah mempengaruhi keberhasilan tidak saja kampanye Pemilu tetapi juga Pemilunya sendiri. Citra ABRI umumnya dan aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat makin dipercaya oleh masyarakat.

⁵Tercermin dari kampanye OPP yang saling memberikan simpati yang bisa dilihat pada reportase surat kabar, misalnya, *Prioritas*, 11 April 1987.

Satu hal lain dalam pengaturan kampanye ini yang perlu mendapat perhatian lebih besar adalah soal proporsi antara kampanye yang diselenggarakan di "luar gedung" dan di "dalam gedung." Kampanye di luar gedung biasanya berbentuk rapat-rapat umum dan pawai-pawai massal; sedang kampanye di dalam gedung berbentuk diskusi-diskusi tentang tema-tema program. Yang disebut pertama biasanya mengutamakan kuantitas dan biasanya cenderung emosional; sedang yang disebut terakhir lebih menonjolkan segi kualitas dan cenderung untuk rasional. Dalam hal ini, tampaknya kampanye Pemilu yang baru berakhir beberapa bulan yang lalu itu masih menunjukkan frekuensi kampanye di luar gedung yang lebih sering (banyak) daripada di dalam gedung.

PENAMPILAN OPP

Penampilan masing-masing OPP dalam kampanye Pemilu menunjukkan bagaimana tingkat kesiapan mereka dalam menghadapi Pemilu. Secara umum Golkar dapat dikatakan paling siap "tempur" baik dalam adu program, strategi, maupun pengorganisasian. PDI, meskipun agak terlambat, tampak telah berhasil dalam mengkonsolidasi diri. OPP berlambangkan Kepala Banteng ini telah mampu membebaskan diri dari kemelut intern selama masa-masa persiapan Pemilu 1987, yang relatif sangat singkat.⁶ Di antara tiga kekuatan sosial-politik peserta Pemilu, mungkin hanya PPP yang mengalami nasib kurang menguntungkan. PPP selama masa-masa persiapan Pemilu masih terus dilanda kekisruhan karena pertentangan pribadi tokoh-tokohnya. Hal ini ditambah lagi dengan kegoncangan dalam mengkonsolidasi kelompok-kelompok basis pendukungnya, terutama karena sikap Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan diri netral dalam Pemilu kali ini. Kesamaan antara PPP dan PDI adalah dalam hal mengkonsolidasi dana. Keduanya memang harus bekerja keras untuk menutup biaya yang sangat besar bagi kebutuhan kampanye mereka. Praktis dalam pengumpulan sumber dana ini, Golkar tidak mengalami kesulitan apa pun, bahkan terlihat berkelebihan.

Keadaan intern organisasi masing-masing OPP tersebut jelas mempengaruhi kiprah mereka dalam kampanye Pemilu. PPP, misalnya, meski secara formal sudah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi, masih juga cenderung untuk mempertahankan ikatan-ikatan lama (tradisional-agama) untuk mempertegas identitasnya. Ada kecenderungan, PPP ingin mempertahankan diri dengan memanipulasi "bahasa-bahasa agama" dalam kampanye; misalnya, dengan pernyataannya yang hendak mengganti GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dengan GBHH (Garis-garis Besar Haluan Hidup). GBHH dimaksudkan sebagai pedoman untuk tata-perilaku masyara-

⁶Praktis masa konsolidasi itu dilakukan sejak DPP PDI baru hasil Kongres PDI III terbentuk pada Mei 1986.

kat dalam segala aspek hidup dan kehidupannya, yang acuannya adalah aturan dan hukum agama. Akibatnya, PPP harus mengandung risiko ditinggalkan oleh pendukung-pendukung intelektualnya serta golongan masyarakat menengah-terdidik lainnya, yang secara prinsipil telah mengalami perubahan-perubahan dalam sikap politik mereka. Situasi ini, selain merupakan kelanjutan dari pertentangan-pertentangan pribadi antar-tokoh-tokoh PPP, juga merupakan persoalan yang mencerminkan belum tuntasnya penerimaan asas Pancasila sebagai wawasan utama organisasi tersebut. Karena itulah kemungkinan pendukung-pendukung kampanye PPP sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat yang mempunyai tingkat kehidupan sosio-ekonomisnya rendah atau lingkungan masyarakat pedalaman (pedesaan). Lingkungan masyarakat demikian ini tampaknya cenderung menonjolkan segi-segi emosional dalam perilaku politiknya. Baik langsung ataupun tidak langsung, kondisi ini jelas mempengaruhi kiprah PPP dalam upayanya merangkul sebesar mungkin pendukung khususnya di daerah-daerah perkotaan.

Tema-tema kampanye PPP yang sebagian besar menekankan atau dikaitkan dengan segi dan aspek kehidupan agama telah berpengaruh besar pada pola gerak kampanye Golkar. Golkar yang seharusnya menampilkan tema-tema pembaruan dan pembangunan, dalam beberapa kesempatan kampanye terlihat sangat "getol" menggunakan dan memanfaatkan tidak saja tokoh dan pemimpin agama tetapi juga "bahasa-bahasa" agama. Akibatnya, citra Golkar sebagai kekuatan pembaharu pembangunan seringkali terendapkan di bawah permukaan.

Di samping itu, Golkar juga banyak menampilkan tokoh dan pemimpin formal (fungsionaris) dalam setiap kesempatan kampanyenya. Di satu pihak, tampilnya para fungsionaris Golkar ini pasti membawa keuntungan khususnya dalam menggaet pendukung di daerah-daerah pedalaman/pedesaan, sebab karakteristik dari kecenderungan pola dan sikap memilih lingkungan masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh pola dan sikap memilih pemimpin dan tokoh formal.⁷ Di lain pihak, tampaknya para fungsionaris Golkar itu sangat terbatas dalam penggunaan "bahasa politik" untuk menyampaikan program-program pembangunannya. Akibatnya, bagi masyarakat di lingkungan daerah perkotaan, Golkar terkesan sebagai kekuatan sosial-politik yang cenderung konservatif dan reaksioner. Kalaupun Golkar memperoleh dukungan suara yang besar dari masyarakat kota, hal itu lebih disebabkan oleh berfungsinya secara baik "mesin politik" keluarga besar Golkar. Hal ini pun juga tampak dalam setiap kampanye Golkar, yakni bahwa sebagian besar peserta kampanye Golkar berasal dari lingkungan massa keluarga besar Golkar.

⁷Wawancara Harry Tjan Silalahi dengan Kompas memberi gambaran mengenai masih kuatnya sikap dan pola panutan di lingkungan masyarakat tersebut. *Kompas*, 6 Maret 1987; *Tempo*, 28 Maret 1987, hal. 22.

Tampilnya para fungsionaris Golkar serta tokoh dan pemimpin agama yang tampak dominan dalam setiap kampanye Golkar, langsung ataupun tidak langsung, telah memperkecil kesempatan dan peluang bagi kader-kader generasi muda Golkar untuk tampil dan melatih diri dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Sebaliknya, tokoh-tokoh muda Golkar, yang penuh dengan potensi kepemimpinan itu, terkesan hanya sebagai "ornamen" dan "pengaman" kampanye Golkar. Tampilnya tokoh-tokoh muda di hadapan massa ini penting, bukan saja karena pentingnya aspek "uji-diri" bagi mereka tetapi lebih-lebih karena aspek terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada mereka. Kepercayaan masyarakat pada masa-masa mendatang sewajarnya tidak ditumpukan pada pemimpin-pemimpin Golkar saat ini tetapi calon-calon pemimpin Golkar yang muda-muda itu. Karena itulah, meskipun selalu dihadiri oleh melimpah-ruahnya massa, kampanye Golkar tetap terasa "ampang." Selain itu, tema-tema yang dikembangkan Golkar dalam kampanyenya terkesan hanya sebagai reaksi saja atas isu yang dikembangkan oleh OPP lain, khususnya PDI.

PDI memang tampil dengan suasana dan wajah baru. Dalam persiapan kampanye Pemilu kali ini PDI tampaknya telah dapat membangun suasana persatuan-kesatuan di dalam organisasinya, baik di tingkat pusat maupun daerah dan dalam hubungan antara pusat dan daerah. Suasana semacam ini jelas berbeda dari penampilan PDI dalam persiapan Pemilu-pemilu yang lalu yang selalu diwarnai oleh pertentangan antara tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpinnya maupun perpecahan organisasi di daerah-daerah. Kemampuan membangun persatuan-kesatuan organisasi secara keseluruhan, selain merupakan suatu prestasi tersendiri bagi tokoh dan pimpinan PDI yang baru itu, sangat mendukung keberhasilan pemunculan PDI dalam rangkaian kampanyenya. Salah satu faktor penentu dari terbangunnya suasana tersebut adalah ditampilkannya tokoh dan pemimpin muda pada jajaran kepemimpinan PDI. Selain membawa "visi" baru, tampilnya orang-orang muda tersebut juga menyeruakkan tekad dan semangat untuk secepatnya menuntaskan fusi di dalam organisasi PDI. Tekad dan semangat itu sangat mungkin dilaksanakan, karena sebagian besar jajaran kepemimpinan PDI yang baru itu tidak terlalu kuat ikatannya dengan unsur-unsur yang mendasari fusi tersebut. Namun begitu, faktor penting utamanya adalah konsistennya tekad dan semangat itu dilaksanakan.

Perkembangan situasi intern organisasi tersebut jelas berpengaruh positif pada kampanye-kampanye PDI, sekurang-kurangnya kampanye PDI terasa telah memberikan suasana baru dalam kehidupan politik Pemilu saat ini. Tema-tema kampanye yang ditawarkan, meskipun bukan hal atau masalah baru, cukup menarik perhatian orang karena disampaikan dengan menggunakan bahasa politik yang kadang-kadang kontradiktif tetapi merangsang untuk ditanggapi. Di samping itu, PDI juga mampu membangun suasana yang "ac-

ceptable” untuk semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun jumlah pendukung tetap sangat kecil, dalam setiap kampanye khususnya dalam putaran-putaran akhir PDI tampak memperoleh dukungan dan simpati massa yang cukup besar. Karena itu, secara keseluruhan, terkesan bahwa PDI mempunyai dukungan dan sumber dana yang sangat memadai untuk pembiayaan kampanye Pemilunya tersebut.

Banyaknya orang-orang muda yang bersimpati untuk kampanye PDI terutama disebabkan oleh munculnya tokoh dan pemimpin muda yang baik langsung maupun tidak langsung mampu membentuk citra partai sebagai partai masa depan. Karena itu, harapan-harapan baru tampak mulai ditumpukan pada PDI. Hanya sayang, PDI sebagai kekuatan sosial-politik yang cenderung menekankan segi-segi intelektualitas hanya mampu menarik massa di kota-kota besar khususnya di Jawa, bahkan sampai menimbulkan kesan sebagai ”partai politik orang Jawa.” Kecuali di beberapa daerah di Sumatra, di daerah-daerah lain di Luar Jawa PDI sangat kurang memperoleh dukungan masyarakat.

SIKAP MASYARAKAT

Pada umumnya sikap masyarakat terhadap kampanye Pemilu, khususnya terhadap OPP, kali ini telah relatif lebih maju daripada dalam kampanye-kampanye Pemilu sebelumnya. Memang, sikap yang tampak pada masyarakat kota menunjukkan kecenderungan yang berbeda dari sikap yang ada pada masyarakat pedesaan. Masyarakat kota, khususnya kota-kota besar di Jawa, menampilkan sikap yang kritis dan kreatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rata-rata tinggi untuk ukuran Indonesia dan rata-rata memperoleh informasi secara lebih cepat dan banyak mengenai berbagai situasi dan kondisi sosial-ekonomi maupun sosial-politik yang menjangkau lingkup nasional dan internasional. Sikap yang demikian itu telah menjadi landasan bagi berkembangnya sikap terbuka pada masyarakat yang bersangkutan. Artinya, regimentasi ataupun fragmentasi atas dasar fanatisme kepartaian, atau bahkan ideologi, mulai ditinggalkan atau semakin larut, meskipun larutnya fanatisme ini sulit diharapkan dari anggota-anggota masyarakat yang menjadi anggota resmi suatu kekuatan sosial-politik. Secara demikian, pertimbangan masyarakat untuk mendukung atau menolak salah satu OPP tidak lagi didasarkan atas ikatan-ikatan tradisional, melainkan lebih pada kenyataan dan rasionalitas.

Pada sebagian masyarakat pedesaan terlihat bahwa pertimbangan-pertimbangan emosional masih menjadi alasan utama dalam menentukan sikap dukungan mereka terhadap salah satu kekuatan politik peserta Pemilu yang ada. Hal ini tentu bisa dimengerti dalam kerangka pikir mengenai ”pola

panutan" yang masih kuat pada lingkup masyarakat tersebut. Namun begitu, pada sebagian masyarakat yang lain tampak mulai tumbuh sikap kritis yang didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan. Artinya, dukungan kepada salah satu OPP akan diberikan bila secara materiil OPP itu memberikan keuntungan-keuntungan tertentu kepadanya. Pertimbangan kemanfaatan itu juga dilatarbelakangi oleh sifat-sifat konservatisme yang tampaknya menjadi karakteristik masyarakat-masyarakat agraris. Pandangan yang berkembang di lingkungan masyarakat ini adalah bahwa perubahan yang akan terjadi pasti merugikan, atau setidaknya tidaknya mengganggu, kondisi sosio-ekonominya.

Identifikasi terhadap sikap masyarakat itu pada dasarnya memberikan gambaran bahwa kampanye Pemilu masing-masing kontestan yang menawarkan nuansa kemanfaatan dan nuansa pembaruan akan memperoleh banyak dukungan dan simpati massa. Golkar dengan tema utama "kesinambungan pembangunan," selain memperoleh dukungan massa pedesaan, telah mampu menarik sebagian besar kalangan masyarakat, pengusaha dan bukan pengusaha, menengah ke atas yang secara langsung ataupun tidak langsung telah memperoleh keuntungan dari proses dan hasil pembangunan selama ini. Sementara itu PDI dengan tema kampanye "peningkatan kualitas kehidupan demokrasi" telah berhasil menarik dukungan dan simpati kalangan masyarakat yang secara sepintas terlihat menghendaki adanya upaya-upaya pembaruan dalam proses pembangunan nasional dewasa ini. Sedangkan PPP yang menekankan kampanye pada aspek kehidupan beragama dan yang tampaknya telah kehilangan sebagian besar "panutan-panutan tradisionalnya" memperoleh sedikit sekali massa pendukung baru. Secara demikian, meskipun ikatan-ikatan tradisional masih mewarnai usaha memperoleh sebanyak mungkin dukungan dan simpati rakyat, khususnya pada masyarakat pedesaan, sebenarnya kegayuhannya sedikit demi sedikit mulai digantikan oleh unsur-unsur yang lebih fungsional dan prospektif, khususnya yang terlihat pada masyarakat perkotaan.

GENERASI MUDA

Di samping untuk pertama kalinya ketiga OPP sama-sama berasaskan Pancasila dalam Pemilu, hal menarik lain yang menjadi karakteristik Pemilu 1987 ini adalah banyaknya para pemilih muda, yakni lebih dari separuh (\pm 46 juta dari 94 juta pemilih terdaftar) berumur 40 tahun ke bawah, yang berarti mereka tidak mengalami perang kemerdekaan, dan di antaranya, 17 juta orang untuk pertama kalinya menggunakan hak memilih mereka dalam Pemilu. Di kota-kota besar di Pulau Jawa khususnya, generasi muda ini banyak yang cenderung berpartisipasi dalam kampanye PDI, yang terlihat terutama pada kampanye PDI terakhir tanggal 17 April 1987 di Jakarta. Banyaknya generasi muda yang terlibat dalam kampanye PDI belum tentu

berarti bahwa suara mereka pasti untuk PDI.⁸ Namun yang jelas, PDI tampaknya mampu membangun suasana yang sesuai dengan "suasana hati" tidak saja sebagian generasi muda tetapi juga mereka yang hendak melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan kurang tepat terutama dalam soal hak-hak politik; kesenjangan pendapatan, keadilan serta pengangguran.⁹ Dalam kaitan ini, tema-tema yang berkisar pada masalah-masalah tersebut cukup menonjol dalam rangkaian kampanye-kampanye PDI.

Gejala dari sikap generasi muda itu memang tidak konklusif karena tidak dapat dibuktikan dengan angka-angka pemilih yang konkret. Namun, bagaimanapun juga, kecenderungan generasi muda itu harus selalu diamati secara seksama dan kontinyu. Pada akhirnya yang dirasakan (meskipun tidak terwujud) oleh masyarakat khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Yogya dan Surabaya adalah bahwa PDI dapat, entah disengaja atau tidak, menyalurkan aspirasi generasi muda yang sulit dilakukan melalui Golkar yang telah mapan dan cenderung konservatif ataupun melalui PPP yang masih terlalu mengutamakan segi-segi perikatan tradisional. Tampaknya PDI dalam kaitan ini telah mampu memanfaatkan kecenderungan sikap generasi muda ini dalam kampanye terakhirnya khususnya di Jakarta.

Kampanye Pemilu dalam era asas tunggal ini juga menyeruakkan sisi lain dari sikap politik generasi muda pada umumnya. Generasi muda, yang sebagian termasuk kelas menengah karena kedudukan, pekerjaan ataupun kekayaan orang tuanya, tampaknya cukup sensitif terhadap perkembangan masyarakat yang melingkunginya. Boleh dikatakan, mereka ternyata juga menunjukkan sikap ikut prihatin dengan dampak negatif dari pembangunan umumnya, peka terhadap masalah-masalah pembangunan politik dan pemenuhan hak-hak rakyat. Secara umum, "social conscience" yang ditunjukkan generasi muda selama masa kampanye terlihat cukup tinggi,¹⁰ setidaknya mereka berani menyatakan pendapat dan unjuk perasaan meskipun kebanyakan di antara mereka dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah untuk mendukung Golkar. Gejala generasi muda yang aktif dan dinamis ini, khususnya dalam proses pem-

⁸"Survey" yang dilakukan *Tempo*, 2 Agustus 1986 dan *Kompas*, 25 Januari 1987, mengarahkan kepada kesimpulan bahwa kecenderungan sikap memilih generasi muda tertuju kepada Golkar.

⁹Lihat "Survey" yang dilakukan oleh harian *Kompas*, 15 April 1987. Penggemar kampanye PDI adalah kaum muda. Tetapi meskipun tidak sampai menjadi pendapat mayoritas, kekecewaan mereka bukanlah merupakan hal yang bisa diabaikan. Apalagi tuntutan mereka terutama berkisar pada masalah hak-hak rakyat, keadilan sosial dan kesempatan kerja.

¹⁰Jusuf Wanandi, "Setelah Pemilu Usai," *Eksekutif* (Juni 1987): hal. 19-20.

bangunan politik, pada akhirnya akan sangat bermanfaat bagi upaya-upaya bersama penyempurnaan langkah-langkah pembangunan nasional.

ISYU DAN TEMA KAMPANYE

Kampanye Pemilu, selain merupakan pesta demokrasi, juga menjadi "sistem" penghimpun informasi dari rakyat. Informasi itu berbentuk pikiran dan aspirasi yang terungkap selama masa kampanye secara terbuka, suatu kesempatan yang mungkin tidak akan diperoleh pada waktu yang lain. Karena itu, masa kampanye menjadi suatu masa bagi mengalirnya informasi dari rakyat kebanyakan secara lebih terbuka dan bebas.¹¹ Masa yang hanya tersedia setiap lima tahun sekali dan yang menghabiskan biaya besar itu menjadi sangat bermanfaat bukan saja untuk mengalirnya informasi dari bawah yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk kebijakan umum tetapi juga untuk "koreksi" rakyat terhadap situasi dan kondisi yang berlangsung saat ini. Pikiran dan aspirasi yang berkembang itu biasanya sangat kaya dengan nuansa dan beragam dalam substansinya.

Beragamnya pikiran dan aspirasi itu memang bisa berkembang menjadi isu selama kampanye. Isyu yang ditangkap, dirumuskan dan kemudian di-suarakan oleh OPP berubah menjadi tema kampanye. Sebaliknya, tema kampanye yang dilontarkan oleh OPP juga dapat berkembang menjadi isu di kalangan masyarakat, yang langsung atau tidak langsung membentuk pikiran dan aspirasi rakyat. Pengamatan atas isu dan tema ini menarik karena keterkaitannya dengan sikap (pikiran) dan tanggapan (tindakan) rakyat terhadap situasi yang berlangsung saat itu, meskipun acapkali pikiran dan tanggapan tersebut tidak selalu terungkap dalam hasil-hasil konkret Pemilu. Isyu dan tema ini meskipun selalu mencakup semua aspek kehidupan yang ada, mungkin sekali hanya satu atau beberapa saja yang menonjol yang mungkin mengendapkan isu dan tema lain yang lebih penting. Penonjolan ini pun dari waktu ke waktu juga berlainan sesuai dengan perkembangan tingkat kehidupan sosio-ekonomi masyarakat itu sendiri yang dengan sendirinya merubah sikap dan tanggapan mereka terhadap kehidupan politik pada umumnya. Hal demikian ini bisa diamati secara sepintas dengan menengok pengalaman-pengalaman kampanye Pemilu yang lalu, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa tema dan isu kampanye juga berpengaruh atas ketenangan, ketentrangan dan keamanan kampanye itu sendiri.

Kampanye Pemilu 1971 memang telah diwarnai oleh tema-tema program pembangunan. Kampanye yang diikuti oleh 9 partai politik (lama) dan satu kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya tampaknya masih sangat dipengaruhi oleh latar-belakang kepartaian yang majemuk pada tahun 1955, yakni

¹¹*Kompas*, 2 Juni 1987.

terjadinya persaingan antara partai-partai kontestan dengan menampilkan tema-tema yang memonopoli kebenaran dalam bidang kenegaraan maupun kehidupan spiritual, yang dinyatakan sebagai program-program pembangunan nasional yang paling baik untuk memajukan bangsa dan Negara Indonesia. Golkar, misalnya, selalu menandakan bahwa dirinyalah yang membangkitkan Orde Baru, yang meletakkan garis baru dalam bidang pembangunan bangsa.¹² Sementara itu, partai-partai yang berasaskan agama, khususnya Islam, acapkali menekankan bahwa umat Islam-lah yang lebih berhak atas Pancasila karena sebagian terbesar rakyat Indonesia adalah umat Islam.¹³ Demikian juga partai yang bercirikan nasionalis, seperti PNI, dalam kampanyenya tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa dirinya yakin akan menang karena berada di pihak yang benar.¹⁴ Meskipun kampanye ini dicanangkan sebagai kampanye program, tema-tema kampanye yang dikembangkan oleh OPP sangat bersifat emosional dan konfrontatif.

Isyu yang berkembang selama masa 2 bulan kampanye Pemilu tersebut adalah soal pelaksanaan Pemilu yang demokratis, bebas dan rahasia. Tampaknya pula isyu ini sangat kuat sehingga mengendapkan tema-tema program yang disuarakan oleh OPP. Munculnya isyu soal Pemilu tersebut dilatarbelakangi oleh suasana yang dirasakan tidak adil dan intimidatif yang diciptakan oleh "kekuatan-kekuatan tertentu" untuk memenangkan Golkar. Misalnya, munculnya Permen 12 dan lahirnya Kokarmendagri dan hidupnya kembali GUPPI dinilai sebagai langkah-langkah yang tidak "adil" yang memojokkan keberadaan partai-partai politik.¹⁵ Karena itu pula, tidak jarang pemerintah dikatakan telah menjadi "bulldozer" yang meratakan jalan menuju pemilihan umum untuk kemenangan Golkar.¹⁶ Reaksi masyarakat terhadap suasana itu tercermin pada sikap mahasiswa yang mengorganisir diri untuk memprotes pelaksanaan kampanye Pemilu. Pada tanggal 28 Mei 1971, gerakan mahasiswa itu dicetuskan sebagai Golongan Putih (Golput) dengan menggunakan lambang seperti tanda gambar Golkar namun dengan ruang kosong putih

¹²A. Samsudin, dkk., *Pemilihan Umum 1971* (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1971), hal. 104.

¹³*Ibid.*, hal. 88, 90, 98-100, 124.

¹⁴*Ibid.*, hal. 118.

¹⁵Permen 12 adalah Peraturan Menteri (Dalam Negeri) No. 12 tahun 1969, yang berintikan antara lain bahwa anggota-anggota departemen hanya boleh memberikan loyalitas kepada bangsa dan negara, bahkan jika perlu melarang warga departemen untuk masuk partai politik. Kokarmendagri (Korps Karyawan Pemerintah Departemen Dalam Negeri) bertujuan agar pegawai negeri yang bersangkutan menanggalkan keanggotaan kepartaian atau keormasannya dan menjadi anggota Kokarmendagri. GUPPI adalah saingan bagi Majelis Ulama untuk menggarap massa Islam agar memilih Golkar. Lihat, Daniel Dhakidae, "Pemilihan Umum di Indonesia," *Prisma*, (September 1982): hal. 31.

¹⁶*Ibid.*

semata-mata. Gerakan yang serupa berjangkit di mana-mana seperti di Bandung, Bogor, Surabaya, dan Yogyakarta. Golput menganggap bahwa aturan main telah dilanggar, dan sebab itu mereka berkampanye supaya orang ikut pemilihan dengan kebebasan penuh untuk memilih apa saja.¹⁷

Kampanye Pemilu 1977 ditandai oleh warna baru kehidupan kepartaian di Indonesia. Kali ini kampanye diikuti oleh 2 partai politik¹⁸ dan satu Golongan Karya. Secara demikian bisa dikatakan, Golkar menjadi peserta yang sudah "berpengalaman," sedangkan kedua partai politik (PPP dan PDI) adalah peserta "baru" yang "tidak mempunyai pengalaman berkampanye" di dalam pemilihan umum sebelumnya. Keadaan demikian ini membawa suasana yang amat penting bagi parpol dalam suatu proses Pemilu yang pada gilirannya juga penting bagi massa pemilih. Di pihak partai hal itu berarti ia harus mampu merumuskan dan menampilkan siapa dirinya karena itu identitas partai menjadi taruhan. Pada gilirannya, massa pemilih harus mengenali apa/siapa partai-partai tersebut. Karena itu hal lain yang penting adalah identifikasi partai yang jelas bagi massa. Dalam hubungan ini, Golkar menjadi satu-satunya peserta Pemilu 1977 yang telah mempunyai "identitas" yang jelas.¹⁹ Keadaan ini mengembangkan suasana kampanye Pemilu 1977 yang hampir tidak jauh berbeda dari suasana pada kampanye Pemilu sebelumnya.

Tema-tema kampanye yang didasarkan pada program-program pembangunan OPP memang dicanangkan sebagai inti kampanye 1977. Pada awalnya Golkar memang mengembangkan tema sentral "Peningkatan Pembangunan dan Pemerataan Hasil-hasilnya,"²⁰ sementara PPP bertekad untuk "memperjuangkan agar rakyat bisa menikmati hasil-hasil pembangunan,"²¹ dan PDI berbicara soal pembangunan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²² Namun tema-tema kampanye itu tampaknya tidak menyambung pada aspirasi dan pikiran rakyat, karena suasananya memang tidak mendukung untuk hal tersebut.

¹⁷Samsudin, *Pemilihan Umum 1971*, hal. 125-127.

¹⁸"Proses fusi secara institusional selesai dengan terbentuknya 2 partai politik baru. Kelompok Nasionalis yang kemudian disebut Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari Partai IPKI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba dan PNI pada tanggal 10 Januari 1973 mengokohkan diri dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kelompok Spirituil yang kemudian disebut Kelompok Persatuan pada tanggal 13 Februari 1973 mengokohkan diri dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang berakar pada Partai NU, PMI, PSII dan Partai Islam Perti.

¹⁹Dhakidae, "Pemilihan Umum di Indonesia," hal. 35.

²⁰*Suara Karya*, 21 Maret 1977.

²¹*Merdeka*, 31 Maret 1977.

²²*Merdeka*, 9 Maret 1977.

Sikap-sikap oposan terhadap Golkar tetap berkembang. Ini dengan sangat efektif dimanfaatkan oleh PPP, yang tampaknya segera menemukan identitasnya dengan mengungkap isu agama. Isyu ini ternyata disambut hangat tidak saja oleh para pemilih tradisional, yaitu umat Islam yang bernaung di bawah organisasi-organisasi Islam atau organisasi politik pendukung PPP, tetapi juga pegawai negeri serta pendukung "rasional" yakni orang yang mendukung PPP karena menganggap sebagai alternatif.²³ Dengan demikian, isu agama yang dikembangkan PPP menjadi sangat dominan mewarnai kampanye 1977. Karena itu pula, Golkar²⁴ secara sadar harus melawan arus yang berkembang itu, meskipun harus mengendapkan tema-tema programnya, dengan mengumandangkan bahwa "tidak benar orang yang masuk Golkar adalah kafir." Upaya utama Golkar dalam kampanye ini adalah memantapkan identitas dan proses identifikasi massa Islam yang berhasil digalang PPP.²⁵ Akibatnya, tema-tema yang memonopoli kebenaran,²⁶ yang tidak jauh berbeda dari kampanye 1971, berkembang demikian gencar sehingga mudah sekali bagi bangkitnya emosi massa yang konfrontatif.

PDI menjadi partai politik peserta Pemilu yang tenggelam di antara dua OPP lain yang saling bersaing memperebutkan dukungan massa. Praktis PDI belum mampu membangun identitas yang bisa mendukung usaha identifikasi oleh massa, meskipun telah mencoba dengan memunculkan diri sebagai partai yang bercirikan demokrasi, kebangsaan dan keadilan sosial serta berusaha membangun citra sebagai partai rakyat kecil. Salah satu sebabnya mungkin adalah sifat heterogenitas yang ada dalam PDI, sehingga tidak ada kesamaan jalan pikiran sedikit pun di antara unsur-unsurnya.²⁷ Secara demikian, tema-tema kampanye yang ditawarkannya juga tidak mampu mendapatkan tanggapan dari masyarakat, yang memang telah disuasanai oleh persaingan pengaruh antara semboyan-semboyan ideologis-agama di satu pihak dan semboyan-semboyan pembangunan dan modernisasi di lain pihak.

Pada kampanye Pemilu yang ke-3 tahun 1982 tampaknya telah berlangsung pergeseran tema dari kemutlakan ke arah slogan dan paradigma pembangunan. Situasi yang berkembang sebelumnya memang telah dibangun secara kondusif untuk kampanye Pemilu yang didasarkan pada program-

²³Dhakidae, "Pemilihan Umum di Indonesia," hal. 36.

²⁴Golkar berusaha keras untuk mengkomunikasikan identitasnya sebagai suatu kekuatan sosial-politik yang terdiri dari manusia-manusia modern yang mengusahakan modernisasi dan pembangunan Indonesia.

²⁵Dhakidae, "Pemilihan Umum di Indonesia," hal. 36.

²⁶PPP mengaku dirinya sebagai satu-satunya wadah bagi umat Islam, sedangkan Golkar menganggap dirinya sebagai satu-satunya kekuatan politik pembaharu yang memacu pembangunan dan demokrasi.

²⁷Dhakidae, "Pemilihan Umum di Indonesia," hal. 36.

program pembangunan, meskipun tetap ada celah-celah yang dapat menjadi sumber persaingan kemutlakan antar-pandangan-pandangan ideologis. Tema-tema kampanye mengenai program-program pembangunan memang telah tampak dikumandangkan baik oleh Golkar, PPP maupun PDI yang disertai oleh nuansa-nuansa yang mencerminkan asas cirinya masing-masing. Masyarakat mulai mengenal secara lebih pasti siapa dan apa Golkar, PPP dan PDI itu.

Golkar menampilkan tema utama "Kesinambungan, Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan serta Hasil-hasilnya"; PPP mengumandangkan tema "Dengan Aklak yang mulia kita membangun Indonesia,"²⁸ dan PDI tampil dengan tema utama "Pembangunan Demokrasi Pancasila di Segala Bidang." Tidak berbeda banyak dari kampanye Pemilu 1977, kali ini Golkar dan PPP juga muncul sebagai dua kekuatan besar yang saling bersaing ketat, sementara PDI tampak cenderung untuk selalu ikut memeriahkan kampanye PPP.²⁹ Meski PDI telah berusaha mengidentifikasi diri sebagai partai orang kecil, tampaknya sangat tidak efektif untuk menarik massa pendukung³⁰ kampanye yang secara kasar telah terbagi antara massa pendukung Golkar dan massa pendukung PPP. Demikian pula, kampanye Pemilu 1982 juga diwarnai oleh berkembangnya isu-isu yang sifatnya sangat kontradiktif.

Kampanye PPP, yang selalu mewarnai tema-tema programnya dengan asas ciri, secara emosional mampu menarik massa bukan saja dari pendukung-pendukung tradisional tetapi juga dari generasi muda dan mereka yang hendak melakukan protes kepada pemerintah (Golkar).³¹ PPP telah mampu menunjukkan dirinya sebagai suatu kekuatan alternatif bagi pembangunan nasional. Di samping isu mengenai pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia, isu-isu yang menonjol adalah soal pertentangan kaya-miskin, kebebasan dan hak-hak politik rakyat, serta soal pelayanan pendidikan termasuk soal libur-puasa. Ini tampaknya merupakan suatu reaksi dan jawaban terhadap situasi yang berkembang pada saat itu yang tampaknya mendapat saluran di PPP. Beberapa juru kampanye PPP mengakui, secara sengaja atau tidak, menjanjikan suatu suasana kontradiktif, misalnya, antara majikan dan buruh, lapisan masyarakat kaya dan miskin dan sebagainya.³² Isyu-isu semacam itu rupanya juga telah menciptakan citra bahwa Golkar adalah pihak yang "kaya" di satu pihak, dan PPP -- dan dalam batas tertentu

²⁸*Pelita*, 16 Maret 1982.

²⁹*Merdeka*, 21 April 1986.

³⁰Lihat, Leo Suryadinata, *Political Parties and the 1982 General Election in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 1982), hal. 48.

³¹*Kompas*, 3 April 1982.

³²*Suara Karya*, 5 April 1982.

PDI -- sebagai pihak yang miskin.³³ Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila kampanye-kampanye Golkar hanya diikuti oleh massa pendukung tetapnya yang tergabung dalam jajaran Keluarga Besar Golongan Karya. Keadaan demikian menunjukkan masih sangat menonjolnya segi-segi emosional dalam kampanye, yang secara tidak terduga diawali oleh suatu peristiwa emosional yang konfrontatif, yakni peristiwa Lapangan Banteng 18 Maret 1982.

Di balik hingar-bingarnya kampanye Pemilu 1982 itu sebenarnya tersirat suatu masalah fundamental bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yakni pertentangan antara ideologi-agama (Islam) dan Pancasila. Kehidupan politik nasional menjelang kampanye Pemilu memang ditandai oleh gejala meningkatnya gerakan-gerakan "Islam-militant" yang anti-Pancasila.³⁴ Pertentangan ini juga tercermin dalam kampanye Pemilu. Dalam pidato kampanyenya, Menteri Dalam Negeri, Amir Mahmud, menyatakan bahwa Pancasila adalah satu-satunya Ideologi bangsa Indonesia, namun saat ini ada sekelompok orang Indonesia yang ingin menggantikan Pancasila dengan Ideologi lain yaitu Islam. Demikian pula, Ketua Umum Golkar, Amir Murtono, menekankan bahwa pemilihan umum adalah suatu peristiwa politik, bukan suatu pilihan agama ataupun ideologi.³⁵ Persoalan ini tampaknya memang harus muncul, sebab dengan itu rakyat Indonesia semakin membulatkan tekadnya untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan ideologis yang telah terbukti mengancam keutuhan persatuan-kesatuan-nya.

Kampanye Pemilu 1987 berjalan dengan suasana yang baru. Ketiga OPP tampaknya benar-benar hendak berkampanye dengan program-program pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 semata-mata. Golkar tampil dengan tema utama "makin memantapkan pelaksanaan demokrasi, konstitusi dan hukum." PDI mengeluarkan tema pokok peningkatan kehidupan demokrasi politik, ekonomi dan sosial-budaya. PPP, dengan kondisi yang lain samasekali dari kondisinya pada tahun 1982, memusatkan tema pada pendidikan dan pemerataan. Tema-tema tersebut dalam pengungkapan penjabarannya memang sulit dibedakan antara yang satu dan yang lain dalam soal materi, meskipun cara penyampaiannya berbeda-beda antara OPP yang satu dan yang lain. Namun tema-tema itu secara spontan mendapat sambutan dan tanggapan yang positif dari kalangan masyarakat luas. Dan karena suasana kebebasan ada, tampak tema-tema kampanye itu bersambut dengan pikiran dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Secara demikian, isi dan pesan

³³FEER, 23 April 1982, hal. 24; juga, Suryadinata, *Political Parties and the 1982 General Election in Indonesia*, hal. 48.

³⁴Gejala meningkatnya gerakan Islam militan itu tercermin pada Pidato Presiden Soeharto di hadapan ABRI yang intinya menandakan perlunya kewaspadaan karena masih adanya "kekuatan-kekuatan" yang anti-Pancasila. Lihat *Tempo*, 14 Juni 1980, hal. 8.

³⁵*Kompas*, 22 April 1982.

yang terkandung di dalam kampanye menjadi bermakna, bukan asal bunyi. Karena itu, orang kemudian tertarik untuk mendengar PDI yang hendak menjadi penyalur dan pembela rakyat kecil; juga kepada PPP yang akan mengikis habis korupsi dan penyelewengan; dan orang pun juga antusias mendengar pimpinan Golkar yang berulang kali menegaskan bahwa selain melanjutkan pembangunan, Golkar akan berdaya-upaya menjembatani kesenjangan sosial.³⁶ Kampanye 1987 telah mensuratkan sederetan persoalan pokok yang harus dihadapi dan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia secara bersama-sama.

Rupanya persoalan-persoalan yang menyangkut perikehidupan hak-hak asasi, hak dan kewajiban pokok rakyat, telah menjadi persoalan yang termasuk menempati urutan pertama.³⁷ Persoalan ini tampak masuk akal sebagai urutan yang pertama bila dilihat dalam kerangka pikiran bahwa perubahan orientasi dan struktur politik yang dikembangkan selama lebih dari 20 tahun terakhir ini cenderung semakin mengarah kepada suatu proses politik yang berada di seputar "supra struktur" semata, sementara proses dalam jalur "infra struktur" menjadi tertinggal. Dengan kata lain, rakyat tampak mulai merasakan kurang diikutsertakan dalam proses politik; rakyat kurang memperoleh saluran yang memadai bagi kehidupan hak-haknya. Pernyataan atas perasaan ini secara langsung tampak tidak saja dalam kampanye-kampanye tertutup tetapi juga dalam pawai-pawai kampanye partai politik.

Persoalan lain berkisar seputar masalah pemerataan dan lapangan kerja. Pemerataan cukup jelas maknanya. Ia merupakan istilah yang lebih teknis atau kurang politis dari keadilan sosial. Demikian pula dengan soal lapangan kerja. Tak ada yang bisa menolak bahwa persoalan tersebut memang harus segera diupayakan pemecahannya, meskipun begitu kompleks kaitan dan cakupannya. Kedua persoalan ini tampaknya telah menyebabkan kesenjangan sosial yang makin meluas, dan kesenjangan sosial ini merupakan keadaan di mana setiap orang dapat menyaksikannya sendiri. Persoalan-persoalan ini, meski lebih sering dinyatakan dalam simbol-simbol, membawa pesan yang sangat jelas.

Masalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga menonjol dalam tema-tema kampanye ini. Ketiga OPP mengungkap secara berulang-ulang persoalan tersebut, yang secara spontan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat luas.³⁸ Ini berarti keprihatinan tentang perlunya pemerintahan yang bersih dan berwibawa tidak hanya dirasakan oleh PDI, PPP ataupun Golkar tetapi juga masyarakat pada umumnya. Pemerintahan yang bersih dikaitkan dengan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang. Adapun gejala

³⁶*Kompas*, 2 April 1987.

³⁷*Kompas*, 7 April 1987.

³⁸*Kompas*, 13 April 1987.

yang diamati dan diketahui oleh masyarakat rupanya bukan segi-segi hukumnya, pelanggaran-pelanggarannya menurut hukum, melainkan gejala dan akibat sosialnya.³⁹ Langsung ataupun tidak langsung, gejala itu telah memperlebar kesenjangan sosial dan akibatnya tertuju pada makin kuatnya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Persoalan-persoalan di atas, di samping persoalan lain seperti pemerataan pendidikan, penataan kehidupan ekonomi yang lebih sehat dan penataan kehidupan politik selanjutnya, merupakan isu-isu utama yang sangat menonjol selama masa 24 hari kampanye Pemilu. Kelebihan kampanye yang ke-5 bagi bangsa Indonesia ini adalah bahwa keadaan yang setiap hari sudah dilihat oleh masyarakat dapat diangkat menjadi isu dengan disertai kesadaran politik. Karena itu, pesan yang hendak disampaikan tampak menjadi makin jelas tidak saja bagi masyarakat luas tetapi juga bagi para penyelenggara pemerintahan. Isu-isu ini pula yang telah membedakan kampanye Pemilu 1987 dari kampanye-kampanye Pemilu sebelumnya.

PENUTUP

Kampanye Pemilu 1987 telah berlangsung lebih baik daripada kampanye-kampanye Pemilu terdahulu, meskipun masih sulit untuk dinilai "berhasil" dengan baik. Pengaturan dan tatalaksana kampanye, sikap aparat keamanan dan tema-tema kampanye merupakan beberapa hal pokok yang mendukung terselenggaranya kampanye Pemilu secara aman, lancar dan tertib. Namun karena kampanye itu bukan sekadar menyangkut hal-hal yang teknis-operasional, harus diakui bahwa sebagai kampanye yang seharusnya mengungkap program-program pembangunan, kampanye yang baru lalu itu belum secara gamblang menunjukkan hal tersebut. Gagasan dan pemikiran yang dibawakan oleh OPP tampaknya belum dapat sepenuhnya mengisi hari-hari kampanye yang disediakan, sehingga terlihat bahwa kampanye yang baru lalu itu masih mengandalkan bentuk-bentuk rally dan pawai massal, hanya saja sikap-sikap emosional-konfrontatif massa sudah makin berkurang. Terkait dengan itu, beberapa upaya untuk penyempurnaan pelaksanaan kampanye Pemilu yang berorientasi pada program kiranya perlu dilakukan sebagai persiapan untuk kampanye Pemilu pada lima tahun mendatang.

Kampanye yang berorientasi program tampaknya kurang memadai bila diselenggarakan hanya dalam jangka waktu kurang dari satu bulan. Terlihat bahwa dalam masa kampanye yang lalu meskipun usaha dilakukan cukup optimal, ketiga OPP ternyata belum mampu menjabarkan, menjelaskan serta merinci program-program secara gamblang. Yang terjadi malahan penyederhanaan program dalam tema-tema yang sloganistis karena kesempatan sangat

³⁹*Ibid.*

terbatas. Ini menyebabkan kampanye kembali ke pola lama yang didominasi "yel dan slogan." Kampanye semacam ini memang bermanfaat bagi proses pendidikan politik terutama di dalam pengenalan tentang kegiatan politik riil yaitu pengerahan massa. Namun kampanye jelas akan lebih bermanfaat bila ia mampu mendukung terselenggaranya proses komunikasi (politik) yang rasional-persuasif. Karena itu, seyogyanya untuk yang akan datang kampanye Pemilu yang benar-benar menjelaskan program-program dipisahkan dan dibedakan dari kampanye Pemilu yang bersifat "pesta-pora" atau pengerahan massa. Yang pertama perlu diberi masa relatif lama antara 6 bulan sampai 1 tahun dan yang kedua cukup disediakan waktu 2-3 minggu sebelum hari pemungutan suara. Banyak manfaat dari pengaturan kampanye seperti itu tidak saja bagi rakyat tetapi juga bagi OPP, pemerintah maupun aparat keamanan.

Salah satu manfaat itu adalah terdorongnya masing-masing OPP untuk saling bersaing meningkatkan kualitas dirinya baik menyangkut personalianya maupun organisasinya. Jangka waktu yang relatif lama untuk menjelaskan program-program itu akan menguji kapasitas dan kredibilitas mereka di hadapan rakyat. Demikian pula, pengaturan kampanye seperti itu akan mendorong berkembangnya tata-hubungan yang kreatif dan dinamis antara OPP dan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas). Ormas sebagai wadah berkumpulnya bagian-bagian masyarakat atas dasar fungsi dan profesi merupakan potensi/sumber informasi yang akan diperlukan oleh OPP terutama untuk penyusunan dan pengembangan program-program mereka agar sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak. Ormas-ormas pada dasarnya mencerminkan perkembangan aspirasi dan kepentingan rakyat tersebut. Dengan demikian kampanye itu juga akan mendorong peningkatan kualitas ormas-ormas itu sendiri. Tentu dalam kaitan ini tata-hubungan itu dikembangkan bukan atas dasar perikatan emosional melainkan atas dasar kepentingan dan imbal-jasa.

Kampanye Pemilu memang tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang di dalam proses kampanye itu sendiri. Ia hanya sekadar masa untuk mengungkap, memberitahukan, bahwa masih ada persoalan-persoalan yang perlu segera diselesaikan. Pengaturan kampanye seperti tersebut di atas kiranya akan membuka kemungkinan baru bagi proses kampanye Pemilu yang tidak hanya sekadar masa untuk mengungkap masalah tetapi juga sekaligus masa untuk menawarkan berbagai jalan penyelesaian masalah-masalah itu. Dengan itu semua, maka kehidupan demokrasi Pancasila kiranya dapat berkembang lebih maju lagi.